

ABSTRAK

PERAN MEDIATOR KESEHATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Oleh

Najwa Alfara Rullyanti

Penyelesaian perkara medis sering kali menimbulkan konflik antara pasien dan tenaga kesehatan yang berdampak pada hubungan dan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator kesehatan dalam penyelesaian perkara medis berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan mediasi tersebut.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yang dimana mempelajari sumber utama yaitu peraturan perundang-undangan dan didukung oleh pengetahuan dari narasumber yang terpercaya yang dilakukan dengan wawancara. Narasumber untuk penelitian ini yaitu Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ketua POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa peran mediator kesehatan dalam penyelesaian perkara medis berdasarkan UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan menunjukkan bahwa mediator kesehatan dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada kompetensi mediator, dukungan kelembagaan, serta kesadaran dan komitmen para peran mediator membantu mengurangi beban sistem peradilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa medis secara efektif serta efisien. Namun, keberhasilan pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Berdasarkan teori penegakan hukum hal yang menghambat dari peran mediator sendiri adalah meliputi berbagai aspek internal dan eksternal yang saling berkaitan, dan juga berdasarkan faktual yang ada muncul dari faktor Hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Dari sisi internal, kurangnya kesadaran, komitmen, dan pemahaman hukum dari pihak pasien

maupun tenaga medis dapat menghambat proses mediasi yang seharusnya bersifat konstruktif dan damai. Dari sisi eksternal, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum dan mediasi, serta belum optimalnya keberadaan lembaga penyelesaian sengketa medis yang memiliki legitimasi kuat, turut memperlambat dan menghambat penerapan keadilan restoratif.

Saran dari penelitian ini yaitu kompetensi mediator kesehatan perlu ditingkatkan secara signifikan melalui pelatihan-pelatihan khusus yang berfokus pada aspek hukum kesehatan dan teknik mediasi. Jika tidak menemukan hasil dari mediasi maka masuk di tahap *Ultimum Remedium* yaitu upaya penyelesaian paling akhir. Penguatan lembaga penyelesaian sengketa medis yang berbasis keadilan restoratif sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Lembaga ini perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan fasilitas yang memadai agar dapat beroperasi secara optimal dan diterima oleh masyarakat luas.

Kata kunci : Kesehatan, Peran Mediator, *Ultimum Remedium*

ABSTRACT

THE ROLE OF HEALTH MEDIATORS IN RESOLUTION OF MEDICAL DISPUTES BASED ON LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH

By

Najwa Alfara Rullyanti

Medical dispute resolution often leads to conflict between patients and healthcare professionals, impacting relationships and healthcare services. Law No. 17 of 2023 concerning Health regulates the mechanism for resolving medical disputes through mediation as a more efficient and effective alternative. This study aims to analyze the role of health mediators in resolving medical disputes under Law No. 17 of 2023 and identify inhibiting factors that influence the implementation of such mediation.

The author used normative and empirical juridical research methods, which studied the primary sources, namely laws and regulations, and supported by knowledge from trusted sources through interviews. The sources for this research were Criminal Law Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung, Civil Law Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung, and the Chairperson of FOGI (Indonesian Obstetrics and Gynecology Association).

The results of this study indicate that the role of the mediator helps reduce the burden on the judicial system and accelerates the resolution process of medical disputes effectively and efficiently. However, the success of health mediators in carrying out their roles greatly depends on the mediator's competence, institutional support, as well as the awareness and commitment of the parties involved to resolve disputes amicably. The obstacles to the mediator's role encompass various interconnected internal and external aspects. Internally, a lack of awareness, commitment, and legal understanding from both patients and healthcare workers can hinder the mediation process, which should ideally be constructive and peaceful. Externally, limitations in the number of competent human resources in the fields of law and mediation, as well as the suboptimal existence of medical dispute resolution institutions with strong legitimacy, further slow down and obstruct the implementation of restorative justice.

The recommendation from this study is that the competence of health mediators needs to be significantly improved through specialized training focused on health law aspects and mediation techniques. Strengthening medical dispute resolution institutions based on restorative justice is crucial to provide legal certainty and a sense of justice for the disputing parties. These institutions need to be supported by clear regulations and adequate facilities to operate optimally and be widely accepted by the public.

Keyword: Health, Role Of Mediators, Ultimum Remedium